

**RESPONS AUDITOR TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENDUKUNG AUDIT
(STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH)**

Nafis El - Fariq
nafiselfariq@gmail.com

Ratna Nurhayati
ratna_n@ugm.ac.id

Intisari

Salah satu upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas audit BPK adalah dengan menerapkan sistem pendukung audit. Namun, penerapan sistem pendukung audit ini akan menghadapi risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadap sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons auditor terhadap penggunaan sistem pendukung audit serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab respons tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **respons auditor terhadap penggunaan sistem pendukung audit di BPK RI masih cenderung negatif**. Sementara itu, faktor-faktor penyebab respons yang teridentifikasi diantaranya: (1) auditor langsung bertanya ke Biro TI ketika menghadapi isu kontingensi, (2) fitur belum mendukung repair, (3) auditor cenderung membaca manual book ketika menghadapi isu kontingensi, dan (4) tampilan muka sistem yang rumit.

Kata kunci: audit sektor publik, penggunaan teknologi informasi dalam audit, respons auditor, sistem pendukung audit, *enabling and coercive framework*.

Abstract

*One effort to maintain and improve the BPK's audit quality is to implement an audit support system. However, the implementation of this audit support system will face operational risk because the auditor may respond positively or negatively to the system. This research aims to analyze the auditor's response to the use of audit support system and to identify the factors that cause the response. This study is a qualitative research with data collection method in the form of document analysis and interview. The results showed that **the auditor's response to the use of audit support system in BPK RI still tend to be negative**. Meanwhile, the factors that identified the responses were (1) the auditor directly asks the IT Bureau when facing contingency issues, (2) the feature does not support the repair, (3) the auditor tends to read the manual book when facing contingency issues, and (4) complex system interfaces.*

Keywords: *public sector audit, use of information technology in audit, auditor response, audit support system, enabling and coercive framework.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki peran yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu ditandai dengan ditetapkannya TAP MPR No.VI/ MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya yang perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional (BPK, 2016 a). Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD tahun 1945 telah diamandemen. Selain itu, untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara (BPK, 2016 a).

Semakin menguatnya peran dan kedudukan BPK RI tersebut membawa konsekuensi pada meningkatnya ekspektasi dan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap institusi BPK (Azis, 2015). Pemda-pemda semakin berupaya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditandai dengan peningkatan opini WTP secara signifikan dari tahun ke tahun (Iqbal, 2016). Dalam 5 tahun terakhir (2011 s.d. 2015) opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami perbaikan. LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada LKPD tahun 2011 menjadi 58% pada LKPD tahun 2015 (BPK, 2017 a).

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat

dan para pemangku kepentingan ini, BPK RI justru masih menghadapi masalah-masalah. Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data pada 27 Mei 2017 bahwa dalam pantauan ICW sejak 2005 hingga 27 Mei 2017 sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor/ pejabat/ staf BPK RI. Selain permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa para auditornya, BPK RI juga dihadapkan pada permasalahan munculnya gugatan-gugatan terhadap hasil pemeriksaan BPK dari pihak terperiksa atau pihak-pihak terkait. Munculnya beragam permasalahan di atas memunculkan keraguan publik atas kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK (MetroTVnews.com, 2017).

Jika merujuk pada literatur, kualitas audit merupakan suatu hal yang sulit diukur. Tidak seperti produk yang berwujud (*tangible*), kualitas output dari audit yaitu opini audit secara prinsip sulit diobservasi (DeAngelo, 1981). Telah banyak studi yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang menentukan kualitas audit. Salah satu studi yang pernah dilakukan mengenai kualitas audit ialah yang dilakukan oleh Hai (2016). Menurutnya, salah satu faktor yang menentukan kualitas audit di antaranya ialah pengendalian kualitas (*quality control*) yang berasal dari dalam firma/ lembaga audit itu sendiri (Hai, 2016). Salah satu perangkat yang bisa dijadikan sebagai alat pengendalian di internal lembaga audit ialah penggunaan sistem kertas kerja elektronis (Bedard, dkk, 2008). Dalam studinya, Bedard, dkk (2008) menemukan bahwa penggunaan sistem kerja elektronis sebagai salah satu sistem pendukung audit merupakan komponen yang sangat penting dalam pengendalian kualitas (*quality control*) pada suatu firma/ lembaga

audit. Penggunaan sistem pendukung audit ini juga bertujuan sebagai alat pengendalian yang berfungsi untuk mengendalikan proses audit (Bedard, dkk, 2008).

Pada tahun 2016, BPK juga mulai secara serius menerapkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) sebagai salah satu sistem pendukung audit khususnya dalam hal pendokumentasian kertas kerja secara elektronik. Tantangan berikutnya ketika sistem pendukung audit digunakan sebagai alat untuk mengendalikan proses audit adalah untuk menyeimbangkan antara independensi auditor ketika menjalankan tugas auditnya dengan tekanan dari regulator/ lembaga untuk menunjukkan kualitas audit yang sesuai dengan kebijakan lembaga, metodologi dan standar audit yang berlaku (Bamber dan Iyer, 2002; Francis, 1994). Untuk menjadi alat pengendalian proses audit yang efektif, sistem tersebut perlu secara aktif membatasi perilaku independen auditor (Dowling dan Leech, 2014). Hal ini akan menimbulkan risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadap sistem (Dowling dan Leech, 2014). Dengan demikian, ketika sistem pendukung audit ini digunakan sebagai alat pengendalian, lembaga audit menghadapi tantangan untuk mendesain sistem yang dapat menyeimbangkan fitur-fitur yang ada pada sistem yang mendorong kepatuhan dengan fitur-fitur yang memberikan otonomi bagi auditor.

Melihat kondisi tersebut, menarik untuk diketahui apakah auditor bereaksi negatif karena merasa terlalu ditekan oleh fitur-fitur sistem yang ada, ataukah bereaksi positif karena merasa sistem telah membantu mereka dan memberi keleluasaan mereka

dalam bekerja. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan model yang serupa dengan yang dilakukan oleh Dowling dan Leech (2014) namun dengan beberapa perbedaan. Berangkat dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Respons Auditor terhadap Penggunaan Sistem Pendukung Audit (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Di tengah meningkatnya kepercayaan dan harapan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, BPK RI justru masih menghadapi masalah-masalah seperti kasus-kasus suap para auditornya dan digugatnya hasil-hasil pemeriksaan BPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat dan para *stakeholder* mengenai kualitas audit yang dihasilkan BPK. Salah satu upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas audit tersebut adalah dengan menerapkan sistem pendukung audit. Namun, penerapan sistem pendukung audit ini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara independensi auditor ketika menjalankan tugas auditnya dengan tekanan dari regulator/ lembaga untuk menunjukkan kualitas audit yang sesuai dengan kebijakan lembaga, metodologi dan standar audit yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadap sistem. Oleh sebab itu penting untuk diteliti mengenai bagaimana respons auditor terhadap penggunaan sistem ini agar penggunaan sistem ini dapat menjadi alat pengendalian yang efektif dalam proses audit di BPK.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana respons auditor terhadap penggunaan sistem pendukung audit (SIAP) di BPK RI dilihat dari 4 prinsip formalisasi dalam *enabling and coercive framework*?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya respons-respons auditor tersebut dilihat dari 4 prinsip formalisasi dalam *enabling and coercive framework*?

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi untuk mengetahui bagaimana respons auditor berkenaan dengan digunakannya sistem pendukung audit serta faktor-faktor penyebab respons tersebut. Dalam menganalisa perubahan perilaku tersebut, penulis menggunakan model atau rerangka *enabling and coercive framework* dari Adler dan Borys (1996). Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta dan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus s.d. Desember 2017.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Pendukung Audit

Penggunaan kertas kerja secara elektronik dalam audit merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dalam audit (Janvrin, Bierstaker dan Lowe, 2008). Penggunaan sistem pendukung audit ini juga bertujuan sebagai alat pengendalian

yang berfungsi untuk mengendalikan proses audit (Bedard, dkk, 2008). Untuk menjadi alat pengendalian proses audit yang efektif, sistem tersebut perlu secara aktif membatasi perilaku independen auditor (Dowling dan Leech, 2014). Hal ini akan menimbulkan risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadap sistem (Dowling dan Leech, 2014).

Auditor dapat merespons negatif jika mereka merasa bahwa lembaga audit mereka menggunakan sistem untuk memaksa usaha dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan lembaga (Adler dan Borys, 1996). Sebaliknya, auditor dapat merespons dengan positif jika mereka merasa bahwa sistem yang digunakan dapat membantu mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya (Bamber, Snowball dan Tubbs, 1989). Dengan demikian, ketika sistem pendukung audit ini digunakan sebagai alat pengendalian, lembaga audit menghadapi tantangan untuk mendesain sistem yang dapat menyeimbangkan fitur-fitur yang ada pada sistem yang mendorong kepatuhan dengan fitur-fitur yang memberikan otonomi bagi auditor.

B. Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) BPK

Sistem pendukung audit yang digunakan oleh BPK ialah Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP). Pada tahun 2016, BPK mulai secara serius menerapkan SIAP sebagai salah satu sistem pendukung audit khususnya dalam hal pendokumentasian kertas kerja secara elektronik. Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan pemeriksaan oleh auditor saat melakukan

kegiatan lapangan. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemeriksaan terutama dalam pengelolaan kertas kerja pemeriksaan bersifat elektronik (BPK, 2016 b). Secara teknis, output dari sistem ini ialah kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan *log history* pekerjaan dan komunikasi antar personel auditor.

C. *Enabling and Coercive Framework*

Dowling dan Leech (2014) telah melakukan penelitian mengenai bagaimana sistem pendukung audit mengubah perilaku auditor dengan menggunakan *enabling and coercive framework* dari Adler dan Borys (1996) untuk menganalisis reaksi auditor terhadap sistem yang diterapkan tersebut. *Formalization framework* ini menyediakan pendekatan umum untuk memahami bagaimana sebuah sistem yang terstruktur dapat mengambil peran ‘memberi keleluasaan’ (*enabling*) atau ‘memaksa’ (*coercive*) (Free, 2007). Rerangka yang dibuat oleh Adler dan Borys (1996) ini menyediakan struktur teoritis dan tervalidasi untuk menginterpretasikan apakah auditor memandang fitur-fitur dalam sistem pendukung audit itu sebagai *enabling* atau *coercive*. Bagaimana sistem ini didesain dan dibuat akan menentukan apakah sistem ini memaksa (*coerce*) atau memberi keleluasaan (*enable*) pada perilaku auditor dan hal ini terefleksikan pada keluaran sikap mereka dan respons mereka terhadap sistem (Adler dan Borys, 1996). Penelitian ini menganalisis respons auditor dan mengklasifikasikan setiap fitur sistem tersebut ke dalam 4 prinsip yang menentukan formalisasi yaitu: pembetulan (*repair*), transparansi internal

(*internal transparency*), transparansi global (*global transparency*), atau fleksibilitas (*flexibility*).

D. Penelitian Terdahulu

Dowling dan Leech (2014) telah melakukan penelitian mengenai bagaimana sistem pendukung audit mengubah perilaku auditor dengan menggunakan *enabling and coercive framework* dari Adler dan Borys (1996) untuk menganalisa reaksi auditor terhadap sistem yang diterapkan tersebut. Mereka meneliti para auditor yang bekerja di firma akuntansi Big 4 di 3 kota besar di Australia. Mereka menemukan bahwa banyak fitur sistem yang memungkinkan pemantauan dan memaksa keterlibatan *reviewer* sehingga meningkatkan frekuensi dan ketepatan waktu interaksi auditor (*preparer*) dan *reviewer*. Walaupun demikian, auditor memandang sistem secara positif dan melaporkan bahwa hal itu memungkinkan penyampaian audit yang efektif.

Penelitian yang pernah dilakukan di BPK terkait sistem pendukung audit ialah penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari (2014). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menggunakan sistem pendukung audit yang dinamakan SiAP LKPD dan implikasinya terhadap kinerja auditor. Studi kasus dilakukan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik individu dengan gender sebagai variabel moderasi, karakteristik teknologi, dan karakteristik konteks organisasi memiliki pengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan SiAP LKPD.

III. METODE PENELITIAN

A. Rasionalitas Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta. Dua kantor ini dipilih sebagai objek penelitian karena termasuk dalam unit kerja yang telah menerapkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) pada pemeriksaan LKPD TA 2016. Selain itu, kedua kantor ini mewakili 2 konteks kondisi yang berkebalikan, yaitu:

1. Berdasarkan data perkara perdata dan administrasi negara terhadap institusi dan personel BPK tahun 2014 s.d. 2017 dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK diketahui bahwa BPK Perwakilan Jawa Tengah pernah menghadapi 2 gugatan perdata terhadap hasil pemeriksaannya karena auditnya dinilai menyalahi prosedur. Sementara itu menurut data Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK, BPK Perwakilan Provinsi DIY belum pernah digugat oleh pihak lain baik dalam perkara perdata maupun administrasi negara (BPK, 2017 b).
2. Berdasarkan data penggunaan aplikasi SIAP dari Biro Teknologi Informasi pada FGD Implementasi SIAP diketahui bahwa BPK RI Perwakilan DIY merupakan unit kerja di Pulau Jawa yang menggunakan aplikasi paling intensif. Sementara itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah menempati peringkat kedua dari bawah pada unit kerja di Pulau Jawa yang paling tidak intens menggunakan sistem.

B. Jenis Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan ialah deskripsi yang detail mengenai kejadian, situasi, interaksi, baik secara lisan maupun visual. Data yang digunakan juga dapat berupa transkripsi wawancara, atau video seperti halnya catatan yang digunakan selama berinteraksi. Dilihat dari jenis datanya, terdapat 2 jenis data yaitu:

1. Data primer yang terdiri dari hasil wawancara dan video/ hasil dokumentasi.
2. Data sekunder yang terdiri dari: panduan/ *manual book* sistem pendukung audit, *log/history* penggunaan sistem, dokumen pemeriksaan, dokumen kelengkapan kertas kerja, dokumen *review* kertas kerja, data organisasi, laporan hasil pemeriksaan, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur yakni dilakukan secara terbuka, namun dengan panduan atau pedoman dari peneliti sehingga tidak melebar dari topik utama. Pedoman wawancara akan mengacu pada indikator-indikator pada *enabling and coercive framework* (Adler dan Borys, 1996). Responden yang diwawancara adalah para pemeriksa dari berbagai jenjang peran pemeriksa. Pemilihan partisipan tidak dilakukan secara acak, tetapi peneliti memilih partisipan tertentu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian yakni auditor yang pernah

menggunakan sistem pendukung audit di BPK.

2. Analisis Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis yaitu: *manual book* sistem pendukung audit, *log/ history* penggunaan sistem, dokumen pemeriksaan, dokumen kelengkapan kertas kerja, dokumen *review* kertas kerja, data organisasi, LHP, dan lain-lain.

C. Analisis Data

Proses analisis data menggunakan spiral analisis sebagaimana dijabarkan oleh Hennink, Hutter, dan Bailey (2014) dalam Birowo (2016). Penelitian ini menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah data kualitatif Dedoose versi 7.6.21 untuk membantu mengorganisasikan proses analisis data dari mulai reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) hingga penarikan kesimpulan. Hasil transkripsi wawancara diinput ke dalam aplikasi Dedoose untuk kemudian diolah di dalam aplikasi tersebut. Output dari aplikasi tersebut berupa tabel pengaplikasian kode per responden dan per peran, kertas kerja pengkodean, kamus definisi kode, gambar awan pengkodean dan grafik kumulatif kode per responden. Pengujian validitas dilakukan dengan triangulasi dan *member checking*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respons Auditor terhadap Penggunaan Sistem Pendukung Audit

1. Tingkat penggunaan sistem

Tingkat penggunaan sistem menggambarkan sejauh mana para auditor menggunakan sistem aplikasi SIAP ini. Pada bagian ini, penulis menggali informasi dari para responden mengenai apakah mereka menggunakan secara penuh dalam semua tahapan pemeriksaan. Selain itu, penulis juga menggali informasi dari auditor mengenai fitur-fitur apa saja yang mereka gunakan pada sistem ini.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar responden anggota tim dan ketua tim menyatakan bahwa mereka memanfaatkan hampir seluruh fitur yang ada di sistem untuk proses pemeriksaan dari tahap perencanaan s.d. pelaksanaan. Untuk tahap pelaporan, mereka belum sempat menyelesaikannya atau bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali.

Hampir senada dengan anggota tim dan ketua tim, para pengendali teknis dan penanggung jawab menyatakan bahwa sistem ini telah mereka gunakan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan LK TA 2016 yang lalu. Hanya saja fitur yang mereka gunakan hanya berfokus pada fitur-fitur terkait pengarahan (*coaching*).

Dengan demikian, secara umum penggunaan sistem ini baru sampai tahap pelaksanaan pemeriksaan, belum sampai pada tahap pelaporan. Untuk fitur-fiturnya secara umum sudah dimanfaatkan oleh para pengguna sesuai tingkat kepentingannya. Para pengendali teknis dan penanggung jawab berfokus pada fitur-fitur terkait *coaching* saja.

2. Pembedulan (*Repair*)

Sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka, suatu sistem dikatakan *enabling* jika sistem tersebut dapat memfasilitasi penggunaannya untuk mengatasi masalahnya sendiri ketika mengalami hal-hal kontingensi, misalnya kerusakan (Dowling dan Leech, 2014).

Berdasarkan hasil analisis dokumen, penulis mengidentifikasi sedikitnya terdapat 4 fitur dalam sistem yang diduga dapat merepresentasikan prinsip pemeliharaan (*repair*), yaitu: (1) bantuan, (2) diagnostik, (3) *backup restore database*, dan (4) hapus KKP. Selanjutnya melalui wawancara dengan responden, penulis berusaha menggali pengalaman setiap responden ketika menggunakan tiap fitur-fitur tersebut dan juga berusaha menggali bagaimana pandangan mereka mengenai kecukupan prinsip pemeliharaan (*repair*) yang ada di dalam sistem.

Pada fitur bantuan ternyata semua responden baik anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, maupun penanggung jawab menyatakan bahwa mereka tidak/ belum pernah sama sekali menggunakan fitur bantuan sekalipun fitur itu tersedia dalam sistem. Pada fitur diagnostik, semua responden baik anggota tim maupun ketua tim kompak menyatakan bahwa mereka tidak/ belum pernah sama sekali menggunakan fitur diagnostik sekalipun fitur itu tersedia dalam sistem. Banyak dari mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak paham apa itu diagnostik dan untuk apa fungsinya. Sama halnya dengan fitur diagnostik, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah sama sekali menggunakan fitur *backup restore*. Mereka tidak mengetahui fungsi dari fitur tersebut

untuk apa dan tidak merasa perlu menggunakan fitur tersebut. Serupa dengan fitur diagnostik dan *backup restore*, hampir seluruh responden juga menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan fitur 'hapus KKP'.

Selanjutnya, ketika para responden ditanyakan mengenai apakah terdapat fitur lain dalam sistem yang dapat memfasilitasi mereka untuk mengatasi problem ketika menghadapi hal-hal kontingensi (*repair*), setengah dari mereka menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui apakah di sistem itu ada atau tidak sistem yang dapat memfasilitasi hal tersebut karena minimnya pemahaman terhadap fungsi-fungsi dari setiap sistem yang ada. Setengah responden lainnya menyatakan bahwa mereka memang tidak menemukan adanya fitur yang dapat memfasilitasi mereka dalam hal tersebut (*repair*).

Terakhir, ketika ditanyakan mengenai apakah sistem sudah cukup memadai dalam hal memfasilitasi penggunaannya untuk mengatasi masalahnya menghadapi hal-hal yang di luar kebiasaan/ kontingensi (*repair*), hampir seluruh responden pada seluruh level peran (anggota tim s.d. penanggung jawab) memandang bahwa fitur-fitur yang ada di dalam sistem, baik yang sudah disebutkan sebelumnya maupun di luar itu, belum cukup memadai untuk memfasilitasi penggunaannya mengatasi problem ketika menghadapi hal-hal kontingensi, atau dengan kata lain sistem belum cukup memadai dalam memenuhi prinsip pemeliharaan (*repair*).

Dengan demikian dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa terkait prinsip pemeliharaan (*repair*), respons para auditor masih negatif. Dalam artian, para auditor

masih menganggap bahwa sistem ini belum memfasilitasi mereka ketika mereka mengalami hal-hal di luar kebiasaan (kontingensi), seperti kerusakan, dan lain-lain.

Tabel 1. Rekapitulasi Respons Auditor untuk Tema ‘Repair’

No.	Subtema	Respons
1	Fitur Bantuan	Negatif
2	Fitur Diagnostik	Negatif
3	Fitur <i>Backup Restore Database</i>	Negatif
4	Fitur Hapus KKP	Negatif
5	Kecukupan <i>Repair</i>	Negatif
6	Fitur Lain <i>Repair</i>	Negatif
Simpulan akhir respons auditor dilihat dari prinsip ‘repair’		Negatif

Sumber: Data penelitian diolah

3. Transparansi internal (*Internal Transparency*)

Sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka, suatu sistem dikatakan *enabling* jika sistem tersebut dapat memfasilitasi penggunaannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses lokalnya (Adler dan Borys, 1996). Mengikuti Dowling dan Leech (2014), penulis mendefinisikan proses lokal dalam penelitian ini sebagai penugasan audit yang dilaksanakan oleh auditor tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, penulis mengidentifikasi sedikitnya terdapat 7 fitur dalam sistem yang diduga dapat merepresentasikan prinsip transparansi internal (*internal transparency*), yaitu: (1) sub-sub menu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, (2) referensi, (3)

diskusi, (4) sinkronisasi, (5) notifikasi, (6) lapming, dan (7) *monitoring* KKP. Selanjutnya melalui wawancara dengan responden, penulis berusaha menggali pengalaman setiap responden ketika menggunakan tiap fitur-fitur tersebut dan juga berusaha menggali bagaimana pandangan mereka mengenai kecukupan prinsip transparansi internal (*internal transparency*) yang ada di dalam sistem.

Pada fitur sub-sub menu pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terdapat beragam respons yang ditunjukkan para auditor. Sebagian besar anggota tim dan ketua tim menganggap bahwa penggunaan fitur sub-sub menu perencanaan s.d pelaporan hanya merupakan proses mendigitalisasi dari proses pekerjaan dan kertas kerja manual. Sebagian responden yang lain memandang bahwa dengan fitur sub-sub menu perencanaan s.d. pelaporan akan meningkatkan pemahaman mengenai pembagian per alur pekerjaan pada penugasan audit yang sedang mereka tangani. Dengan menggunakan fitur ini, mereka lebih memahami alur pekerjaan secara langkah per langkah.

Serupa dengan fitur sub-sub menu pada perencanaan s.d. pelaporan, pada fitur referensi juga terdapat respons yang beragam dari auditor. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penggunaan fitur ini sangat mudah dan dari penggunaan sistem ini akan memudahkan auditor yang berada di level peran yang di atas memantau dan memahami apa yang dikerjakan bawahannya karena hasil pekerjaan anggota tim disematkan atau dilampirkan di fitur ini dapat dilihat oleh peran di atasnya. Sementara itu sebagian yang lain menyatakan bahwa

mereka tidak memakai fitur referensi karena berbagai alasan.

Pada fitur diskusi, hampir seluruh anggota tim dan ketua tim sepakat bahwa mereka tidak menggunakan dan tidak memerlukan fitur diskusi ini karena keberadaan mereka di 1 ruangan pada saat melaksanakan pekerjaan di lapangan membuat fitur diskusi kurang efisien dan bermanfaat. Mereka lebih memilih diskusi secara langsung *face to face* ataupun lewat WA karena dinilai lebih membawa efek positif daripada diskusi melalui fitur sistem ini.

Pada fitur sinkronisasi respons para auditor juga beragam. Banyak dari anggota tim dan ketua tim yang menyatakan bahwa proses sinkronisasi hasil pekerjaan yang telah terekam di dalam sistem terkadang sangat sulit karena terkendala masalah jaringan atau masalah teknis aplikasi lainnya. Sementara itu sebagian anggota tim dan ketua tim yang lain menyatakan sebaliknya. Mereka menyatakan proses sinkronisasi baik dengan *server* KT maupun *server* pusat selama ini lancar-lancar saja sehingga tidak ada masalah dengan penyajian progres pekerjaan pada sistem.

Pada fitur notifikasi, salah seorang pengendali teknis menyatakan bahwa notifikasi yang masuk selalu *update* namun membingungkan. Sementara itu penanggung jawab menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa terdapat fitur notifikasi di dalam sistem karena selama ini dia tidak merasa mendapatkan notifikasi dari sistem. Kedua hal itu menunjukkan bahwa fitur notifikasi belum terlalu efektif keberadaannya untuk membantu pengguna

mengetahui informasi versi pekerjaan terbaru yang masuk akun aplikasinya.

Selanjutnya pada fitur lapming (laporan mingguan), terdapat pernyataan yang kontradiktif antar responden. Kontradiksi ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara kedua pihak terkait pelaporan menggunakan fitur sistem ini sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan fitur lapming ini belum efektif.

Pada fitur *monitoring* KKP, para pengendali teknis dan penanggung jawab merespons bahwa penggunaan fitur ini tidak maksimal. Hal ini membuat sistem ini tidak memiliki nilai tambah dalam hal pemahaman terhadap penugasan dan berakibat tidak efisiennya proses pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Di samping itu, hal ini juga menyebabkan penanggungjawab dan pengendali teknis kesulitan *me-monitor* hasil pekerjaan tim dan menjadi sangat pasif dalam memonitoring KKP.

Selanjutnya, ketika para responden ditanyakan mengenai apakah terdapat fitur lain dalam sistem yang dapat memfasilitasi mereka untuk meningkatkan pemahaman terhadap penugasan (*internal transparency*), jawabannya sangat beragam.

Terakhir, ketika ditanyakan mengenai apakah sistem sudah cukup memadai dalam hal memfasilitasi penggunaannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap penugasan (*internal transparency*), hampir seluruh responden pada seluruh level peran (anggota tim s.d. penanggung jawab) memandang bahwa fitur-fitur yang ada di dalam sistem, baik yang sudah disebutkan sebelumnya maupun di luar itu, belum cukup memadai untuk memfasilitasi penggunaannya meningkatkan pemahaman terhadap

penugasan karena penggunaan sistem ini sebenarnya hanya sebatas digitalisasi dari proses manual.

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada beberapa fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi internal (*internal transparency*) respons auditor masih cenderung negatif.

Tabel 2. Rekapitulasi Respons Auditor untuk Tema '*Internal Transparency*'

No.	Subtema	Respons
1	Fitur Sub Menu P3	Beragam
2	Fitur Referensi	Beragam
3	Fitur Diskusi	Negatif
4	Fitur Sinkronisasi	Beragam
5	Fitur Notifikasi	Negatif
6	Fitur Lapming	Negatif
7	Fitur Monitoring KKP	Negatif
8	Kecukupan <i>Internal Transparency</i>	Negatif
9	Fitur Lain <i>Internal Transparency</i>	Beragam
Simpulan akhir respons auditor dilihat dari prinsip '<i>internal transparency</i>'		Cenderung Negatif

Sumber: Data penelitian diolah

4. Transparansi global (*Global Transparency*)

Sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka, suatu sistem dikatakan *enabling* jika sistem tersebut dapat memfasilitasi penggunaannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses globalnya (Adler dan Borys, 1996). Mengikuti Dowling dan Leech (2014), penulis mendefinisikan proses global dalam

penelitian ini sebagai metodologi atau kebijakan pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, penulis mengidentifikasi sedikitnya terdapat 3 fitur dalam sistem yang diduga dapat merepresentasikan prinsip transparansi global (*global transparency*), yaitu: (1) pustaka/manual audit, (2) *template*, dan (3) *lookup* KKP. Selanjutnya melalui wawancara dengan responden, penulis berusaha menggali pengalaman setiap responden ketika menggunakan tiap fitur-fitur tersebut dan juga berusaha menggali bagaimana pandangan mereka mengenai kecukupan prinsip transparansi global (*global transparency*) yang ada di dalam sistem.

Pada fitur pustaka terdapat respons yang beragam dari para responden. Sebagian responden anggota tim dan ketua tim menyatakan respons positif terhadap fitur ini dimana mereka merasa bahwa adanya fitur ini dapat membantu mereka dalam hal memudahkan pencarian kriteria/ peraturan pemeriksaan ketika di lapangan. Sebagian responden yang lain, termasuk pengendali teknis dan penanggung jawab merespons secara negatif dengan tidak terlalu menggunakan fitur pustaka/manual audit tersebut.

Pada fitur *template* seluruh responden anggota tim dan ketua tim merespons secara negatif dengan tidak menggunakan fitur tersebut di sistem karena berbagai alasan. Ada anggota tim dan ketua tim yang menyatakan bahwa menggunakan fitur tersebut dianggap terlalu ribet. Sementara itu ada pula yang menyatakan bahwa *template* yang terdapat dalam sistem tidak sesuai dengan format yang seharusnya sesuai aturan standar/ juknis/ juklak/ panduan. Pada

fitur *lookup* KKP juga hampir seluruh responden anggota tim dan ketua tim merespons secara negatif dengan tidak menggunakan fitur tersebut di sistem karena berbagai alasan.

Selanjutnya, ketika para responden ditanyakan mengenai apakah terdapat fitur lain dalam sistem yang dapat memfasilitasi mereka untuk meningkatkan pemahaman terhadap metodologi atau kebijakan pemeriksaan BPK (*global transparency*), jawabannya cukup beragam. Sebagian besar dari mereka menjawab tidak ada fitur lain selain yang disebutkan sebelumnya yang dapat memfasilitasi prinsip transparansi global (*global transparency*). Sebagian yang lain menjawab fitur-fitur seperti *approve/disapprove*, *audit pack*, diskusi, *e-audit*, dan statistik sebagai fitur yang dapat memfasilitasi peningkatan pemahaman terhadap metodologi atau kebijakan pemeriksaan BPK.

Terakhir, ketika ditanyakan mengenai apakah sistem sudah cukup memadai dalam hal memfasilitasi *user*-nya untuk meningkatkan pemahaman terhadap metodologi atau kebijakan pemeriksaan BPK (*global transparency*), hampir seluruh responden pada seluruh level peran (anggota tim s.d. penanggung jawab) memandang bahwa fitur-fitur yang ada di dalam sistem, baik yang sudah disebutkan sebelumnya maupun di luar itu, belum cukup memadai untuk memfasilitasi penggunaannya meningkatkan pemahaman terhadap metodologi atau kebijakan pemeriksaan BPK. Dengan kata lain, sistem belum cukup memadai dalam memenuhi prinsip transparansi global (*global transparency*).

Tabel 3. Rekapitulasi Respons Auditor untuk Tema '*Global Transparency*'

No.	Subtema	Respons
1	Fitur Pustaka/ Manual Audit	Beragam
2	Fitur <i>Template</i>	Negatif
3	Fitur <i>Lookup</i> KKP	Negatif
5	Kecukupan <i>Global Transparency</i>	Negatif
6	Fitur Lain <i>Global Transparency</i>	Beragam
Simpulan akhir respons auditor dilihat dari prinsip '<i>global transparency</i>'		Cenderung Negatif

Sumber: Data penelitian diolah

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi global (*global transparency*) respons auditor masih cenderung negatif.

5. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka, suatu sistem dikatakan *enabling* jika sistem tersebut dapat menyediakan pilihan bagaimana mereka menggunakan sistem tersebut dan menyediakan pilihan terhadap isu-isu yang muncul yang perlu ditangani oleh penggunanya (Adler dan Borys, 1996).

Berdasarkan hasil analisis dokumen, penulis mengidentifikasi sedikitnya terdapat 3 fitur dalam sistem yang diduga dapat merepresentasikan fleksibilitas (*flexibility*), yaitu: (1) deskripsi, (2) tambah dan *edit*, dan (3) *approval*. Selanjutnya melalui wawancara dengan responden, penulis berusaha menggali pengalaman setiap responden ketika

menggunakan tiap fitur-fitur tersebut dan juga berusaha menggali bagaimana pandangan mereka mengenai kecukupan fleksibilitas (*flexibility*) yang ada di dalam sistem.

Pada fitur deskripsi hampir seluruh anggota tim dan ketua tim merespons positif keberadaan fitur ini. Mereka menganggap bahwa penggunaan fitur sub-sub menu perencanaan s.d. pelaporan hanya merupakan proses yang cukup sederhana yaitu menyalin tempel (*copy paste*) dari dokumen KKP yang ada.

Pada fitur tambah dan *edit*, seluruh responden merespons secara negatif. Mereka kurang merasa fleksibel karena walaupun terdapat fitur *edit*, tetapi jika suatu versi pekerjaan/ KKP terdapat kesalahan dan versi tersebut sudah dikirimkan ke level di atasnya, maka versi tersebut tidak bisa dikoreksi lagi.

Pada fitur *approval* terdapat beragam respons dari para responden, namun cenderung positif. Salah seorang pengendali teknis menyatakan bahwa pada fitur *approval* ini ia bisa bebas menerima/ menolak versi pekerjaan dari auditor di bawahnya. Selain itu, ia juga bisa bebas memberi arahan apapun pada fitur tersebut.

Selanjutnya, ketika para responden ditanyakan mengenai apakah terdapat fitur lain dalam sistem yang dapat memfasilitasi dalam hal fleksibilitas (*flexibility*), jawabannya cukup beragam. Sebagian dari mereka menjawab tidak ada fitur lain selain yang disebutkan sebelumnya. Sebagian yang lain menjawab fitur-fitur seperti referensi dan *export* sebagai fitur yang dapat memfasilitasi prinsip fleksibilitas.

Terakhir, ketika ditanyakan mengenai apakah sistem sudah cukup memadai dalam

hal memfasilitasi fleksibilitas (*flexibility*) bagi para penggunanya jawabannya cukup beragam namun cenderung positif. Dengan kata lain, sistem tersebut dianggap sudah cukup memadai dalam memenuhi prinsip fleksibilitas (*flexibility*).

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara negatif, namun lebih banyak yang direspons secara positif. Dengan demikian, terkait prinsip fleksibilitas (*flexibility*) respons auditor cenderung positif.

Tabel 4. Rekapitulasi Respons Auditor untuk Tema '*Flexibility*'

No.	Subtema	Respons
1	Fitur Tambah dan <i>Edit</i>	Negatif
2	Fitur Deskripsi	Positif
3	Fitur <i>Approval</i>	Beragam
5	Kecukupan <i>Flexibility</i>	Beragam
6	Fitur Lain <i>Flexibility</i>	Beragam
Simpulan akhir respons auditor dilihat dari prinsip '<i>flexibility</i>'		Cenderung Positif

Sumber: Data penelitian diolah

6. Pandangan auditor terhadap sistem secara umum

Setelah menganalisa respons auditor dilihat dari 4 prinsip formalisasi (*repair*, *internal transparency*, *global transparency*, dan *flexibility*), penulis juga menggali dan menganalisis mengenai bagaimana pandangan responden terhadap sistem ini secara umum. Responden diberikan pertanyaan terbuka mengenai pandangannya terhadap sistem ini secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk melangkapi analisis

mengenai respons auditor terhadap penggunaan sistem ini. Berdasarkan hasil wawancara didapat beberapa pandangan yang bernada positif maupun bernada negatif mengenai sistem ini.

Dari semua pandangan yang disampaikan responden dari berbagai tingkatan dari mulai anggota tim hingga penanggung jawab hanya terdapat 4 pandangan yang bernada positif. Berikut akan disajikan pandangan-pandangan bernada positif secara berurutan dari mulai yang signifikan hingga yang tidak signifikan, yaitu: (1) Sistem mendorong ke arah minim dokumen fisik (*paperless*); (2) Sistem membantu menyediakan *repository* KKP sebelumnya; (3) Sistem membuat pekerjaan audit menjadi lebih terstruktur. (4) Sistem mendorong ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Di sisi lain, terdapat setidaknya 8 pandangan bernada negatif terhadap sistem ini secara umum yang disampaikan oleh beberapa responden dari berbagai tingkatan dari anggota tim hingga penanggung jawab. Berikut akan disajikan pandangan-pandangan bernada negatif secara berurutan dari mulai yang signifikan hingga yang tidak signifikan, yaitu: (1) Sistem kurang *user friendly*; (2) Sistem belum dilengkapi alat analisis/*template* generik yang memadai; (3) Penggunaan sistem dianggap membebani auditor; (4) Kesadaran akan pentingnya sistem masih rendah; (5) Sistem menghadapi kendala jaringan; (6) Sistem kurang disosialisasikan dengan baik; (7) Sistem kurang memberikan keleluasaan dalam *editing* pekerjaan; (8) Sistem belum bisa menerapkan *full paperless*.

B. Faktor-faktor penyebab respons auditor terhadap penggunaan sistem

Pembahasan tentang faktor-faktor penyebab ini dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan prinsip-prinsip yang menentukan formalisasi sebagaimana tertuang dalam *Enabling and Coercive Theory* dari Adler dan Borys (1996), yaitu:

1. Faktor Penyebab Respons Auditor Dilihat dari Prinsip *Repair*

Pada uraian pembahasan tentang Pembetulan (*Repair*) didapatkan simpulan bahwa terkait prinsip pembetulan (*repair*), respons para auditor masih negatif. Faktor-faktor yang menyebabkan respons tersebut secara berurutan dari yang paling signifikan hingga yang tidak signifikan yaitu: (1) Auditor langsung bertanya ke Biro TI ketika menghadapi isu kontingensi; (2) Fitur belum mendukung *repair*; (3) Auditor cenderung membaca *manual book* ketika menghadapi isu kontingensi; dan (4) Tampilan muka sistem yang rumit.

2. Faktor Penyebab Respons Auditor Dilihat dari Prinsip *Internal Transparency*

Pada uraian pembahasan tentang transparansi internal (*Internal Transparency*) didapatkan simpulan bahwa walaupun ada beberapa fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi internal (*internal transparency*) respons auditor masih cenderung negatif. Faktor-faktor yang menyebabkan respons tersebut secara berurutan dari yang paling signifikan hingga yang tidak signifikan yaitu: (1) Sistem hanya mendigitalisasi hasil pekerjaan manual; (2) Sistem mendorong pekerjaan audit menjadi lebih terstruktur. (3) Sistem

membutuhkan waktu proses yang lama. (4) Hasil pekerjaan yang diinput ke dalam sistem harus sudah *fixed* dulu; (4) Kesadaran akan pentingnya sistem yang masih rendah.

3. Faktor Penyebab Respons Auditor Dilihat dari Prinsip *Global Transparency*

Pada uraian pembahasan tentang transparansi global (*global transparency*) didapatkan simpulan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi global (*global transparency*) respons auditor masih cenderung negatif. Faktor-faktor yang menyebabkan respons tersebut secara berurutan dari yang paling signifikan hingga yang tidak signifikan yaitu: (1) Sistem tidak dilengkapi dengan alat bantu analisis yang memadai; (2) Auditor menganggap bahwa pemahaman telah dimiliki sejak awal. (3) Sistem mendorong keseragaman penerapan metodologi; (4) Sistem tidak memiliki perangkat metodologi yang relevan dan mutakhir; (5) Sistem memiliki tampilan fitur yang kompleks.

4. Faktor Penyebab Respons Auditor Dilihat dari Prinsip *Flexibility*

Pada uraian pembahasan tentang Fleksibilitas (*Flexibility*) didapatkan simpulan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara negatif, namun lebih banyak yang direspons secara positif. Dengan demikian, terkait prinsip fleksibilitas (*flexibility*) respons auditor cenderung positif.

Faktor-faktor yang menyebabkan respons tersebut secara berurutan dari yang paling signifikan hingga yang tidak signifikan yaitu: (1) Sistem memungkinkan prosedur yang diinput bisa diatur; (2) Sistem tidak

memberi keleluasaan pemilihan prosedur; (3) Sistem memberi keleluasaan akses kepada pengguna; (4) Sistem dianggap sudah memenuhi kebutuhan; (5) Sistem tidak menggantikan pekerjaan manual; (6) Sistem tidak memungkinkan penggunaanya untuk bisa mengedit secara langsung.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Dilihat dari **prinsip pembetulan (*repair*)** didapatkan simpulan bahwa respons para auditor masih **negatif**. Dalam artian, para auditor masih menganggap bahwa sistem ini belum memfasilitasi mereka ketika mereka mengalami hal-hal di luar kebiasaan/ kontingensi, seperti kerusakan, dan lain-lain.
2. Dilihat dari **prinsip transparansi internal (*internal transparency*)** didapatkan simpulan bahwa walaupun ada beberapa fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi internal (*internal transparency*) respons auditor masih **cenderung negatif**.
3. Dilihat dari **prinsip transparansi global (*global transparency*)** dapat disimpulkan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara positif, namun lebih banyak yang direspons secara negatif. Dengan demikian, terkait prinsip transparansi global (*global transparency*) respons auditor masih **cenderung negatif**.
4. Dilihat dari **prinsip fleksibilitas (*flexibility*)** didapatkan simpulan bahwa walaupun ada fitur yang direspons secara negatif, namun lebih banyak yang direspons secara positif. Dengan

demikian, terkait prinsip fleksibilitas (*flexibility*) respons auditor **cenderung positif**.

5. Terdapat beragam pandangan terhadap sistem secara umum dari para responden. Terdapat 4 pandangan yang bernada positif dan 8 pandangan yang bernada negatif.
6. Dari poin-poin di atas diketahui bahwa walaupun dari prinsip fleksibilitas (*flexibility*) respons auditor cenderung positif, tetapi jika dilihat dari prinsip pembetulan (*repair*) respons auditor masih negatif. Dilihat dari prinsip transparansi internal (*internal transparency*) dan transparansi global (*global transparency*) juga respons auditor masih cenderung negatif. Menurut Adler dan Borys (1996) keempat prinsip tersebut sama pentingnya dan tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Pandangan auditor terhadap sistem secara umum juga lebih banyak bernada negatif daripada yang positif. Dengan demikian, dapat ditarik simpulan akhir bahwa **respons auditor terhadap penggunaan sistem pendukung audit di BPK RI masih cenderung negatif**.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini tidak dapat menggunakan metode studi kasus karena metode pengumpulan datanya tidak bisa dilakukan dengan observasi secara *real time* melihat penggunaan sistem pada saat pemeriksaan di lapangan. Saat penelitian ini berlangsung, masa pemeriksaan laporan keuangan dimana sistem ini biasanya digunakan sudah

berlalu, dan baru akan dilaksanakan lagi pada awal tahun berikutnya sehingga waktunya tidak pas dengan waktu penelitian. Untuk itu, metode yang digunakan hanya wawancara dan analisis dokumen.

2. Dalam pengumpulan data penelitian, wawancara terhadap salah satu penanggung jawab di BPK Perwakilan Provinsi DIY tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan pada awal penelitian. Hal ini disebabkan karena pada saat penelitian berlangsung, yang bersangkutan sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. 2 dan karenanya tidak dapat memenuhi permintaan untuk wawancara. Sekiranya yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan wawancara tersebut, hal itu tentu akan menambah perspektif respons dari level penanggung jawab pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P.S., dan Borys, B. 1996. "Two types of bureaucracy: Enabling and coercive." *Administrative Science Quarterly*, 41(1), 61-89.
- Azis, H.A.. 2015. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum yang disampaikan di UNUSA Surabaya, 30 Oktober 2015
- Bamber, E.M. dan Snowball, D. 1988. "An Experimental Study of The Effects of Audit Structure in Uncertain Task Environments". *The Accounting Review*. 64 (2): 588-606.

- Bamber E.M., Snowball, D dan Tubbs, R.M.. 1989. "Audit Structure and Its Relation to Role Conflict and Ambiguity." *The Accounting Review*. 63 (3): 285 – 606.
- Bamber, E. M., dan Iyer, V. M. 2002. "Big 5 auditors' professional and organizational identification: Consistency or conflict?" *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 21(2), 21–38
- Banker, R. D., Chang, H. dan Kao, Y. 2002. "Impact of information technology on public accounting firm productivity." *Journal of Information Systems* 16 (2): 209–22.
- Bedard, dkk. 2008. "Risk monitoring and control in audit firms: a research synthesis", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 27 No. 1, pp. 187-218.
- Bedard, J.C, Ettredge, M.L, dan Johnstone, K.M. 2007. "Using electronic audit workpaper systems in audit practice: Task analysis, learning and resistance." *Advances in Accounting Behavioral Research* 10 (1): 29-53
- Birowo, A.P. 2016. "Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja (Studi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah)", Tesis Gelar Master, Universitas Gadjah Mada.
- BPK RI. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2014. *Petunjuk Penggunaan Aplikasi SIAP*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2016 a. *Laporan Tahunan BPK RI 2015*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2016 b. *Panduan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP)*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2017 a. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2016*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2017 b. *Data Gugatan Perdata dan Administrasi kepada BPK Tahun 2014 s.d 2016*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2017 c. *Slide Presentasi FGD Implementasi SIAP*. Jakarta: BPK RI.
- Creswell, J. W. 2014. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)" Thousand Oaks, CA: Sage.
- DeAngelo, L. 1981. "Auditor size and audit quality." *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183-199.
- Dedoose Version 7.6.21. 2016. "web application for managing, analyzing, and presenting qualitative and mixed method research data. Los Angeles, CA: SocioCultural Research Consultants, LLC. URL: www.dedoose.com.
- Dowling, C. dan Leech, S. 2014. "A Big 4 Firm's Use of Information Technology to Control the Audit Process: How an Audit Support System is Changing Auditor Behavior." *Contemporary Accounting Research*, 31(1), p. 230-252
- Francis, J. 1994. "Auditing, Hermeneutics and Subjectivity." *Accounting, Organizations and Society*, Vol.19, No.3, 1994, p. 235-271
- Free, C. 2007. "Supply chain accounting perspectives in the UK retail sector: Enabling or coercive collaboration?" *Contemporary Accounting Research* 19 (3), p. 411-44
- Hai, P.T. 2016. "The Research of Factors Affecting the Quality of Audit Activities: Empirical Evidence in Vietnam" *International Journal of*

- Business and Management*, Vol.11, No. 3, 2016, p. 83-94.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk akuntansi dan manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Iqbal, M. 2016. “Apakah Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dipertimbangkan dalam Formulasi Opini BPK?”, Tesis Gelar Master, Universitas Gadjah Mada.
- Janvrin, D., Bierstaker, J, dan Lowe, D.J.. 2008. “An examination of audit information technology use and perceived importance.” *Accounting Horizons* 22 (1): 1–21.
- Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK RI. Tahun 2014
- Kompas, 2017 a. “Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK”, 28 Mei 2017. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071/kronologi.kasus.dugaan.suap.pejabat.kemendes.pdtt.dan.auditor.bpk>
- Kompas, 2017 b. “ICW: Sejak 2005, Ada 6 Kasus Suap Libatkan 23 Pejabat BPK”, 27 Mei 2017. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/14054551/icw.sejak.2015.ada.6.kasus.suap.libatkan.23.pejabat.bpk>
- Manson, S., McCartney, S., dan Sheerer, M. 2001. “Audit automation as control within audit firms.” *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 14 (1): 109–30.
- Media Indonesia, 2014. “Terdakwa Gugat BPK”, 4 Februari 2014
- Messier, Jr., W. F. 1995. “Research in and development of audit decision aids. In Judgment and Decision Making in Accounting and Auditing”, edited by R. H. Ashton and A. H. Ashton. Cambridge: Cambridge University Press.
- Metro Jambi, 2016. “Ini Alasan Kepala UPCA Gugat BPK Jambi”, 3 Agustus 2016. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 06.30 WIB. <http://metrojambi.com/read/2016/08/03/12509/ini-alasan-kepala-upca-gugat-bpk-jambi>
- Metro Jambi, 2017. “Breaking News! Digugat Kepala UPCA, BPK Kalah di PTUN Jambi”, 14 Februari 2016. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 06.45 WIB. <http://metrojambi.com/read/2017/02/14/18633/breaking-news-digugat-kepala-upca-bpk-kalah-di-ptun-jambi>
- MetroTVnews.com, 2017. “Calon Anggota BPK Diharapkan Mampu Jawab Keraguan Publik”, 7 April 2017. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 06.18 WIB. <http://m.metrotvnews.com/read/2017/04/07/682699/calon-anggota-bpk-diharapkan-mampu-jawab-keraguan-publik>
- Radar Semarang, 2014. “PT Ampuh Sejahtera Gugat BPK”, 17 Mei 2014. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 23.57 WIB

<https://radarsemarang.com/2014/05/17/pt-ampuh-sejahtera-gugat-bpk/>

- Sekaran, U dan Bougie, R. 2013. "Research Methods for Business: Sixth Edition" New Jersey: John Wiley and Sons, Ltd.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Torkzadeh, G., Koufteros, X., dan Doll, W.J. 2005, "Confirmatory factor analysis and factorial invariance of the impact of information technology instrument." *The International Journal of Management Science* 33: 107-118.
- Yuliasari, E. 2014. "Analisis Faktor Determinan Penggunaan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Implikasinya." *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknik Informatika* 03 (2): 83-8.